



Sinopsis

Judul : IDENTIFIKASI KORBAN BENCANA MASSAL: PRAKTIK DVI ANTARA TEORI DAN KENYATAAN

Penulis : OKTAVINDA SAFITRY

Definisi bencana sangat bervariasi. Menurut WHO, bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI, bencana adalah peristiwa/kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Sejalan dengan itu, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan amanat kepada pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya identifikasi terhadap mayat yang tidak dikenal. Identifikasi korban mati dilakukan untuk memenuhi hak korban agar dapat dikembalikan kepada keluarga dan dikubur secara layak sesuai dengan keyakinannya semasa hidup. Ada dampak hukum dengan meninggalnya seseorang seperti waris, asuransi, serta pada kasus kriminal maka akan dapat dihentikan apabila pelaku telah meninggal dunia.

Sejalan dengan itu, prosedur identifikasi mengacu pada prosedur DVI (Disaster Victim Identification) Interpol. Poses DVI yang terdiri dari 5 fase yaitu The Scene, Post Mortem Examination, Ante Mortem Information Retrieval, Reconciliation dan Debriefing. Pada kasus Identifikasi korban gempa di Padang, fasilitas menjadi kendala yang utama dimana pada 3 hari pertama tidak ada listrik dan sarana lain untuk mempreservasi jenazah, sehingga kondisi mayat membusuk pada saat telah teridentifikasi. Hal ini sempat menimbulkan penolakan dari keluarga. Selain itu, pada kasus jatuhnya pesawat hercules di Magetan, tim DVI mengalami kendala karena ada kurang koordinasi antara fase TKP dengan fase II & III; pemeriksaan fase II dan fase III dilakukan oleh orang yang sama secara bersama-sama dan melibatkan keluarga; ini menimbulkan ketidakakuratan dalam proses identifikasi,

Menyikapi hal tersebut, dapat dilihat bahwa dari kedua kasus tersebut, fase kelima (debriefing) tidak dilaksanakan. Kesulitan yang dihadapi adalah mengumpulkan kembali para anggota tim yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia untuk melakukan evaluasi kinerja. Secara teoritis, kelima fase DVI seharusnya dikerjakan sesuai standar pada setiap kasus bencana namun dalam kenyataannya sering kali menemui kendala teknis, maupun nonteknis. Jumlah jenazah yang banyak, tempat penyimpanan jenazah yang minim, waktu yang terbatas, jumlah dokter forensik yang terbatas, otoritas keluarga serta kurangnya koordinasi menimbulkan masalah dalam menerapkan prosedur DVI secara konsisten



TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PREKISI
PRODUKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARAN - BERKEADILAN

ASEP WINARDI SUNDOWO, A.Md. Ft, S.H.
SERDIK SPPK – POKJAR I
NO SERDIK: 202409002010